

Implementasi Kebijakan Dan Program Populis Kepala Desa Bandasari Dalam Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat

(Studi Kasus Desa Bandasari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)

Andi Syamsul Muarib¹, Agustinus Holo¹, Adrianus Oulan¹

(1) Magister Ilmu Pemerintahan STPM “APMD” Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: andisham344@gmail.com

Abstract: *The results that can be obtained from this research are that the Bandarari Village Government created a drainage system to maintain village roads, facilitate community access, and improve environmental sanitation. The village head promised to continue this project until the entire region can obtain adequate benefits. However, the program to build cellular network towers and solutions to the problem of weak telephone signals in this area, does not provide a sustainable solution. The policies made by the Bandarari Village Government are considered populist policies because they only address temporary problems and do not provide long-term solutions to these problems. This populist policy has an impact on the level of community satisfaction with government performance which has decreased because village government policies do not consider long-term aspects and are only focused on physical development. People who are disappointed hope that the village government can pay attention to the sustainability of the program that has been launched. This research uses a qualitative descriptive method to understand the implementation of populist policies and programs carried out by the Bandarari Village head in influencing the level of community satisfaction. The research location is in Bandarari Village, Air Upas District, Ketapang Regency. A qualitative approach was chosen because the aim of this research was to explore and understand the community's perceptions, experiences and level of satisfaction with the programs that had been implemented by the village head.*

Keywords: *Implementation, Policy, Populist;*

Abstrak: Hasil yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Bandasari menciptakan sistem drainase untuk menjaga jalan desa, memudahkan akses masyarakat, dan meningkatkan sanitasi lingkungan. Kepala desa berjanji akan melanjutkan proyek ini hingga seluruh wilayah dapat memperoleh manfaat yang memadai. Namun, program pembangunan *tower* jaringan seluler dan solusi atas masalah sinyal telepon yang lemah di wilayah ini, tidak memberikan solusi yang berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bandasari termasuk ke dalam kebijakan yang bersifat populis karena hanya mengatasi masalah sementara dan tidak memberikan solusi penyelesaian jangka panjang bagi permasalahan tersebut. Kebijakan populis tersebut berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang mengalami penurunan dikarenakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa tidak mempertimbangkan aspek jangka panjang dan hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata. Masyarakat yang mengalami kekecewaan berharap pemerintah desa dapat memperhatikan keberlanjutan program yang sudah diluncurkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan dan program populis yang dilakukan oleh kepala Desa Bandasari dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Lokasi penelitian berada di Desa Bandasari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang. Pendekatan kualitatif



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menggali dan memahami persepsi, pengalaman, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program yang telah diterapkan oleh kepala desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Populis;

Article Information: Submitted: 2024-12-23; Revised 2025-01-10; Accepted: 2025-01-23

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang [1]. Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses kebijakan publik [2]. Menurut Mazmanian, implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan hukum dasar yang dapat berupa perintah, keputusan, atau putusan pengadilan [3]. Pelaksanaan dimulai setelah sejumlah tahapan seperti pengesahan undang-undang dan kemudian dihasilkan dalam bentuk implementasi keputusan kebijakan, dan seterusnya hingga kebijakan korektif yang relevan.

Berkaitan dengan implementasi dijelaskan bahwa implementasi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan [4]. Namun, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan untuk memastikan apakah kebijakan tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat atau tidak. Tujuannya adalah agar kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, terlebih dapat merugikan mereka. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari implementasi adalah memahami langkah-langkah yang harus diambil setelah kebijakan dibuat atau dalam hal ini melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil dari kebijakan publik umumnya berupa dokumen, bangunan, jalan, manusia, dan lain sebagainya. Sementara dalam bentuk hasilnya adalah terdapat rumusan target-target, tercapainya kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat atau lembaga masyarakat dan sebagainya [5].

Implementasi kebijakan merupakan hal yang melibatkan berbagai aspek, termasuk cara implementasi sebagai sarana administrasi hukum dan sebagai hasil dari kebijakan yang kompleks. Situmorang (2016) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam kebijakan publik dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelesaian isu-isu publik [6]. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan, dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan setelah suatu kebijakan diformulasikan dengan tujuan yang jelas. Dalam suatu kebijakan, implementasi adalah serangkaian aktivitas dengan tujuan mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut [7].

Fokus dari implementasi kebijakan yaitu peristiwa dan aktivitas yang terjadi setelah penetapan pedoman kebijakan publik, termasuk upaya administrasi dan dampak nyata yang timbul pada masyarakat. Hal itu karena implementasi kebijakan merupakan pemahaman tentang apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

suatu proses pelaksanaan kebijakan yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara kebijakan dengan tujuan tertentu.

Suatu kebijakan dibuat tentu memiliki tujuan tertentu sesuai kebutuhan penyelenggara kebijakan dan dampaknya pada masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer, dalam hal ini setiap kebijakan atau putusan regulasi yang ada dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan yang biasa disebut dengan lembaga legislatif. Sistem yang berlaku tersebut merupakan suatu sistem yang bisa dikatakan ideal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun terkadang dalam penerapan sistem tersebut jauh dari kata ideal. Hal ini dapat menimbulkan suatu ketimpangan atau masalah walaupun dalam hal ini menggunakan fungsi legislasi yang sama. Secara objektif kebijakan yang ada cenderung melibatkan ide atau gagasan yang sifatnya populis tentu dengan tujuan tertentu yang sifatnya hanya berdampak pada segelintir individu atau kelompok tertentu.

Kaitannya dengan kebijakan terkadang pemerintah juga sering memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai alat atau instrumen dalam menarik dukungan masyarakat. Dalam hal ini tentu dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya populer dikalangan masyarakat. Kebijakan populer atau biasa juga disebut kebijakan populis berlaku hanya semata-mata untuk menyenangkan masyarakat tanpa mempertimbangkan konseskuensi atau dampak yang akan dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya terkadang dampak yang dihasilkan hanya bersifat sementara. Kebijakan populis adalah alat bagi pemimpin dalam politik untuk mendapatkan dukungan dan mempertahankan kekuasaan [8].

Kebijakan populis dapat dipahami sebagai kebijakan yang dianggap lebih berfokus pada keuntungan politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, sehingga kerap menuai kritikan atas implementasinya [9]. Misalnya, terdapat penerapan program-program yang bersifat populis dengan tidak disertai perencanaan anggaran secara rinci sehingga dapat berpotensi membebani keuangan suatu daerah atau negara di masa yang akan datang. Selain itu, implementasi-implementasi yang tidak disertai perencanaan jangka panjang yang berpotensi menciptakan masalah baru dengan tidak terselesaikannya masalah lama juga termasuk ke dalam kebijakan yang bersifat populis. Kebijakan populis biasanya dijadikan sebagai alat bagi seorang pemimpin atau calon pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan atau menarik dukungan politik melalui program-program yang populer di kalangan masyarakat. Kebijakan populis dapat disenangi masyarakat dikarenakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah masyarakat dalam jangka pendek [8].

Kondisi yang sama terjadi di Desa Bandasari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Kepala Desa Bandasari menuangkan ide dan gagasannya dalam suatu kebijakan atau program yang sifatnya populis ditengah masyarakat. Kebijakan atau program populis tersebut merupakan suatu program yang diusung oleh kepala desa bandasari dalam hal ini untuk dilaksanakan dan dapat bermanfaat serta memiliki dampak positif bagi masyarakat nantinya. Suatu kewajiban bagi kepala desa untuk membuat kebijakan yang dapat berdampak pada perkembangan pembangunan desa. Akan tetapi kebijakan atau program



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

populis biasanya cenderung memiliki dampak yang sifatnya sementara dan tidak menjadi suatu program yang sifatnya berkelanjutan atau jangka panjang. Kebijakan dan program populis tersebut juga cenderung hanya berdampak pada individu-individu atau kelompok tertentu yang notabeneanya tertrik dengan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya kebijakan atau program yang ditawarkan oleh kepala Desa Bandasari lebih pada pembangunan yang sifatnya fisik atau dalam hal ini infrastuktur. Pembangunan infrasturuktur yang diadakan antara lain seperti pembangunan drainase untuk pemeliharaan jalan dan pembangunan *tower* jaringan seluler. Kebijakan atau program yang hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja merupakan kebijakan atau program yang sifatnya populis. Dalam artian pembangunan infrastruktur tersebut semata-mata hanya satu-satunya kebijakan atau program yang bisa dikembangkan dan hal ini sudah menjadi *mindset* masyarakat bahwa perkembangan pembangunan diukur dari pembangunan yang sifatnya fisik atau infrastuktur saja. Padahal pembangunan yang ideal tidak terfokus pada pembangunan fisik atau infrastuktur saja tetapi juga terfokus pada pambangunan sumber daya manusia yang ada. Jadi harus ada keseimbangan yang dibangun antara kedua pembangunan tersebut. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih jauh kaitannya dengan kebijakan dan program populis kepala Desa Bandasari dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan dan program populis yang dilakukan oleh kepala Desa Bandasari dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Desa Bandasari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, di mana penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei hingga 5 Juni 2024.

Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menggali dan memahami persepsi, pengalaman [10]. Sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program yang telah diterapkan oleh kepala desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung dan studi dokumentasi. Sumber data meliputi tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, serta perangkat desa, yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kebijakan yang diterapkan serta pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat dan juga artikel ilmiah penelitian terdahulu.

Dalam analisis data, pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan penelitian [10]. Hasil analisis data diharapkan dapat menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan dan program populis kepala Desa Bandasari dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kebijakan tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam memberikan gambaran konkret tentang



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

efektivitas kebijakan populis di tingkat desa dalam konteks Desa Bandasari, serta dapat menjadi referensi bagi kepala desa lain di wilayah serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan dan Program Populis Kepala Desa

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mendorong pembangunan yang inklusif, kepala desa perlu mempertimbangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Bandasari. Kebijakan dan program yang direncanakan tidak hanya dipandang bagus tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan program juga harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan program fisik dan program non fisik sehingga program yang akan diimplementasikan dapat berjalan bersamaan. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik diperlukan guna dapat memastikan bahwa manfaat dari implementasi sebuah kebijakan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Program pembangunan fisik biasanya tersiri dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti fasilitas umum, jalan dan selokan, sedangkan pembangunan non fisik salah satunya berbentuk pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Program kebijakan pembangunan fisik harus dibarengi dengan program kebijakan pembangunan non fisik karena aspek non fisik seperti kualitas SDM tersebutlah yang akan menjalankan pembangunan fisik dengan target jangka panjang, maka keseimbangan tersebut sangat diperlukan. Menurut Meidiani, pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama [11].

Kepala Desa Bandasari telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program namun penulis menilai bahwa kebijakan dan program-program yang dijalankan di dominasi oleh program yang bersifat fisik sehingga program tersebut juga dapat dikatakan sebagai program populis. Program seperti pembangunan drainase dan pembangunan jaringan internet mejadi skala prioritas yang di usung oleh kepala desa. Dilihat dari sisi positif, pelaksanaan program tersebut menunjukkan komitmen kepala desa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Bandasari. Namun sisi negatif dari kebijakan dan program tersebut adalah kurangnya perhatian dari pemerintah desa khususnya kepala desa dalam mendorong pembangunan non fisik. Tidak dibarenginya pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik akan berakibat pada timbulnya masalah baru dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu masyarakat yang mampu menilai dan berfikir kritis akan merasakan ketidakefektifannya kebijakan yang dijalankan dan berdampak pada tingkat kepuasan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis membahas implementasi kebijakan dan program populis yang dijalankan oleh kepala Desa Bandasari berdasarkan data yang didapatkan dengan fokus pada dua program utama, yaitu pembangunan drainase untuk pemeliharaan jalan serta pembangunan *tower* jaringan seluler. Keduanya merupakan inisiatif yang dianggap vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mendukung kemajuan infrastruktur di Desa Bandasari. Berikut analisisnya:

1. Pembangunan Drainase Untuk Pemeliharaan Jalan

Pembangunan sistem drainase merupakan salah satu upaya besar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bandasari dalam rangka pemeliharaan jalan desa. Sebagai desa yang masih bergantung pada jalan untuk transportasi, maka memiliki infrastruktur jalan yang baik sangatlah penting. Namun selama bertahun-tahun, jalan desa seringkali rusak akibat buruknya pengelolaan air hujan di tambah lagi teksutur jalan yang masih berupa tanah merah. Hal ini menimbulkan genangan air dan terkadang merusak permukaan jalan. Oleh karena itu, pembangunan sistem drainase dirancang untuk mencegah kerusakan jalan lebih lanjut dengan mengatur aliran air dan menghindari genangan pada jalan utama.

Pembangunan sistem drainase ini memberikan dampak positif yang signifikan. Berdasarkan pantauan, jalan yang dulunya sering terendam banjir kini menjadi lebih kering, meski saat musim hujan. Hal ini membantu memperpanjang umur jalan desa dan mengurangi biaya pemeliharaan yang sebelumnya harus dilakukan secara rutin akibat kerusakan.

Dibangunnya sistem drainase ini juga menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat dalam mengakses aktivitas sehari-hari, terutama mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai desa pertanian, Bandarari bergantung pada akses jalan yang memadai untuk mengangkut hasil panen ke pasar terdekat. Sebelum adanya sistem drainase, banyak petani yang menghadapi permasalahan akibat jalan rusak atau licin yang dapat berujung pada kecelakaan. Selain itu, pembangunan sistem drainase juga mendorong masyarakat desa Bandasari untuk lebih memperhatikan sanitasi lingkungan. Dengan sistem drainase yang terkelola, masyarakat membantu menjaga saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran lingkungan pasca pembangunan infrastruktur.

Selama proses pembangunannya, proyek ini tak lepas dari kendala. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah desa melakukan pembangunan sistem drainase secara bertahap. Artinya, beberapa wilayah di desa tersebut tidak memiliki saluran drainase yang baik. Namun, kepala desa Bandarari berjanji akan melanjutkan proyek ini hingga seluruh wilayah dapat memperoleh manfaat dari infrastruktur drainase yang memadai.

2. Pembangunan *Tower* Jaringan Seluler



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program kedua yang menjadi fokus dalam kebijakan kepala Desa Bendasari adalah pembangunan *tower* jaringan seluler. Sebagai desa yang terletak di area perbukitan, Desa Bendasari mengalami kendala dalam hal akses jaringan telekomunikasi. Kondisi ini menjadi hambatan, terutama dalam era digital yang semakin membutuhkan akses komunikasi yang cepat dan mudah. Pembangunan *tower* ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan sinyal seluler sehingga masyarakat Bendasari dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dan memanfaatkan teknologi untuk berbagai kebutuhan, baik pendidikan, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan.

Sejak dibangunnya *tower* jaringan seluler, terjadi peningkatan yang signifikan dalam akses telekomunikasi di Desa Bendasari. Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses internet kini dapat berkomunikasi dengan lebih baik, bahkan dapat memanfaatkan layanan digital untuk pendidikan dan perdagangan. Sebagai contoh, para petani sawit kini bisa memanfaatkan internet untuk mencari informasi harga kelapa sawit, pupuk dan pestisida pembasmi hama atau mendapatkan pengetahuan tambahan tentang teknik pertanian kelapa sawit yang lebih modern.

Para pelajar dan mahasiswa yang tinggal di Desa Bendasari juga merasakan manfaat besar dari adanya *tower* ini. Mereka kini dapat mengakses materi pembelajaran secara online dengan lebih mudah, terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan karena pandemi. Akses internet yang lebih baik juga mendukung perkembangan ekonomi kreatif di kalangan pemuda desa, yang kini mulai merambah usaha online untuk memasarkan produk lokal, seperti kerajinan tangan dari rotan dan makanan khas daerah seperti *tempoyak*.

Meski membawa banyak manfaat, pembangunan *tower* jaringan seluler juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah adanya proses perizinan yang memerlukan waktu cukup lama, mengingat lokasi Bendasari yang terpencil dan akses infrastruktur yang masih terbatas. Meski begitu, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan dukungan dari masyarakat, kendala ini dapat diatasi dengan menyewa tanah milik salah satu masyarakat sehingga *tower* dapat berdiri dan berfungsi dengan baik.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Program Kepala Desa

Desa Bendasari memiliki kebijakan dan program yang diluncurkan oleh kepala desa dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Menurut data yang diperoleh oleh penulis yang merupakan masyarakat Desa Bendasari, pada awalnya mayoritas masyarakat merasa puas dengan beberapa program yang dianggap sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu program yang sangat diapresiasi adalah pembangunan drainase di sepanjang jalan utama desa. Program ini bertujuan mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Adanya drainase yang baik diharapkan bisa mengurangi genangan air yang dapat merusak jalan desa dan menghambat



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

aktivitas masyarakat. Selain itu, ada pula program pembangunan *tower* jaringan seluler yang dianggap sebagai solusi atas masalah sinyal telepon yang lemah di wilayah ini. Kedua program ini menuai respon positif dari masyarakat karena dianggap tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan yang mendesak.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program ini mulai mengalami penurunan. Beberapa masyarakat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Mereka merasa bahwa meskipun program-program ini pada awalnya tampak bermanfaat, namun sifatnya yang populis dan cenderung hanya memberi solusi jangka pendek menyebabkan berbagai masalah yang muncul kemudian.

Dalam hal pembangunan drainase, masyarakat mulai merasakan beberapa kekurangan dalam implementasi dan pemeliharaannya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa kualitas pengerjaan drainase tersebut tidak optimal, sehingga drainase yang dibangun cepat mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alih-alih menyelesaikan masalah banjir, beberapa bagian drainase justru tersumbat oleh sampah dan material lain yang tidak dibersihkan secara berkala. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, air justru meluap dari drainase dan kembali menyebabkan banjir di jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki manfaat awal, dampak jangka panjangnya tidak memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Beberapa masyarakat menilai bahwa kebijakan ini lebih condong ke pendekatan populis yang menonjolkan hasil cepat tetapi kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Sementara itu, pembangunan *tower* jaringan seluler juga menuai kritik serupa. Pada awal pelaksanaannya, masyarakat sangat antusias karena mereka berharap memiliki akses komunikasi yang lebih baik dan stabil. Sebelumnya, masalah sinyal yang buruk membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan panggilan atau mengakses internet, yang tentu saja menjadi kendala dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dengan keluarga yang tinggal di luar desa, kebutuhan pendidikan, serta akses informasi penting. Namun, beberapa bulan setelah *tower* selesai dibangun, masyarakat mulai merasakan bahwa kualitas sinyal tidak sesuai harapan. Masih ada banyak area di desa yang mengalami sinyal yang lemah, dan tidak jarang jaringan sering hilang terutama pada jam-jam sibuk.

Kekecewaan masyarakat ini semakin meningkat karena tidak ada langkah pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mereka mulai mempertanyakan efektivitas program ini, yang dinilai lebih menonjolkan sisi pencitraan kepala desa dibandingkan manfaat nyata yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Masyarakat mengungkapkan bahwa meskipun kedua program tersebut pada awalnya terlihat membawa perubahan positif, namun tanpa adanya perencanaan yang matang dan upaya perbaikan secara berkala, program-program ini menjadi kurang efektif dan justru menjadi sumber keluhan baru di kalangan masyarakat.

Pengalaman masyarakat Desa Bendasari terhadap program-program populis ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kebijakan pemerintah desa tidak hanya tergantung pada manfaat yang langsung dirasakan, tetapi juga pada bagaimana program tersebut



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mampu memberikan dampak jangka panjang. Pendekatan populis yang hanya berfokus pada program-program dengan hasil cepat sering kali tidak memadai untuk menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah desa ke depannya lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap program yang diluncurkan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Pembahasan implementasi kebijakan dan program populis yang dijalankan oleh kepala Desa Bendasari juga mengacu pada penelitian sebelumnya [12]. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan menjelaskan tentang kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang bersifat populis. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa ketika terdapat kebijakan populis tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan hasil yang rendah karena dinilai dari segi kebermanfaatan kebijakan tersebut cenderung tidak berkelanjutan dan bahkan ada yang menilai perencanaan pada kebijakan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan [13]. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan menjadi pendukung pada penelitian terdahulu karena terdapat kesamaan hasil penelitian yaitu kebijakan yang bersifat populis dinilai pada awalnya terlihat membawa perubahan positif tetapi karena tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan upaya perbaikan secara berkala, maka akan berdampak kurang efektif dan justru menjadi sumber masalah baru di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepala Desa Bendasari telah meluncurkan program-program yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Meskipun awalnya program tersebut dianggap bermanfaat, ada beberapa masalah yang muncul kemudian. Program pembangunan *tower* jaringan seluler dan solusi atas masalah sinyal telepon yang lemah di wilayah ini menarik perhatian masyarakat. Namun, beberapa bagian drainase tersumbat oleh sampah dan material lain, menunjukkan bahwa program ini kurang memberikan solusi yang berkelanjutan. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program ini, yang dinilai hanya menonjolkan hasil cepat. Masyarakat berharap agar pemerintah desa memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap program yang diluncurkan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat Desa Bendasari mempunyai kesadaran dan pikiran yang kritis dalam merespon kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desanya, meskipun diawal belum menyadari tetapi pada seiring berjalannya waktu masyarakat kemudian tersadar bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendasari hanya bersifat jangka pendek dan termasuk dalam kebijakan yang populis. Masyarakat menyadari bahwa dengan mempertanyakan efektivitas program-program dari kebijakan yang dijalankan dan menilai justru kebijakan tersebut lebih menonjolkan sisi pencitraan dari kepala desa dibandingkan manfaat nyata yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program-program yang dijalankan menjadi kurang efektif dan justru menjadi sumber keluhan dan masalah baru di kalangan masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bandasari terutama pada kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Kepercayaan masyarakat mulai menurun karena menilai bahwa pemerintah desa tidak memikirkan kepentingan bersama dan kurang dalam melakukan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan.

Saran yang bisa dikembangkan kaitannya dengan kebijakan dan program populis tersebut tentu dalam penerapannya tidak hanya berfokus pada Pembangunan infrastruktur saja tetapi juga harus fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Desa Bandasari tersebut. Dikarenakan, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM perlu dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian pembangunan yang telah terealisasi harus menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan tersebut tidak memiliki dampak atau manfaat yang sifatnya hanya sementara tetapi pembangunan yang telah direalisasikan harus memiliki dampak dan manfaat yang berkepanjangan. Tentu dengan melakukan pemeliharaan pada pembangunan yang ada.

REFERENSI

- [1] E. M. Arbiani, A. Azhar, and M. Mahdum, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *J. Manaj. Pendidik. Penelit. Kualitatif*, vol. 3, no. 2, p. 104, 2019, doi: 10.31258/jmppk.3.2.p.104-115.
- [2] N. Sunarti, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan," 2016.
- [3] dan P. A. S. Mazmanian, Daniel H., *Implementasi and Public Policy*. New York: Harper Collins, 1983.
- [4] U. Kaendung, Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *dalam J. Gov. Jur. Ilmu Pemerintah. FISPOL Unsrat*, vol. 1, no. 2, pp. 1–11, 2021.
- [5] J. Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 2020.
- [6] C. Situmorang, "Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)," 2016, *Social Security Development Institute (SSDI)*.
- [7] B. Puguh, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *J. Polit. Muda*, vol. 4, no. 1, pp. 116–125, 2015.
- [8] M. Haboddin, "Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal," *JPW (Jurnal Polit. Walisongo)*, vol. 1, no. 1, p. 21, 2019, doi: 10.21580/jpw.v1i1.2335.
- [9] M. Haboddin, "Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal," *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 1, no. 2, p. 173, 2019, doi: 10.33474/jisop.v1i2.4802.
- [10] M. Ramdhan, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- [11] T. Paniagih *et al.*, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Non Fisik Di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar," pp. 585–596.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- [12] A. Holo, “POPULISME INCAMBENT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2023 DI DESA BANDA SARI KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG,” STPMD “APMD”, Yogyakarta, 2023.
- [13] I. P. Putra and T. Darmi, “Analisis Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa,” *JOPPAS J. Public Policy Adm. Silampari*, vol. 3, no. 2, pp. 71–83, 2022, doi: 10.31539/joppas.v3i2.3947.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.